

## Analisis kinerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Propinsi Jambi

Mirza Unsury

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=88472&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Pembangunan lingkungan hidup merupakan subsistem dari pembangunan nasional. Hal ini telah ditetapkan dalam GBHN 1993, yaitu terwujudnya kelestarian lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk itu, tanggungjawab dalam pengendalian lingkungan hidup merupakan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan pembangunan lingkungan hidup tersebut dibuat berbagai kebijaksanaan dan perangkat hukum pendukungnya baik di tingkat pusat maupun di daerah. Di tingkat pusat telah dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), sedangkan di daerah dibentuk Bapedalda (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah) sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

Guna mengatasi berbagai persoalan lingkungan hidup yang terjadi di Propinsi Jambi, maka pemerintah setempat menerbitkan Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (Bapedalda) dan kemudian diganti dengan Perda No. 5 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (Bapedalda), yang berfungsi sebagai lembaga koordinasi dalam penanggulangan masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di propinsi ini. Ada 3 (tiga) masalah lingkungan hidup yang mendapat prioritas Pemerintah Propinsi Jambi saat ini yaitu, masalah penebangan liar (illegal logging), masalah PETI (penambangan emas tanpa izin), dan masalah pembabatan hutan bakau (mangrove).

Bagaimana kinerja lembaga ini dalam menangani masalah lingkungan yang terjadi di Propinsi Jambi adalah fokus dari penelitian ini. Kinerja lembaga ini dapat ditinjau dari Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dan Renstra (Rencana Strategis) yang dibuat lembaga ini. Bertolak dari permasalahan itu maka tujuan dari studi ini adalah untuk meneliti bagaimana pelaksanaan Tupoksi dan Renstra, apa ada keterkaitan satu sama lainnya, dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja Bapedalda Propinsi Jambi, dan bagaimana kinerja Bapedalda tersebut.

Berdasarkan analisis isi (teks), terdapat keterkaitan antara tugas pokok dan fungsi dengan rencana strategis Bapedalda Propinsi Jambi. Proses analisis dimulai dari Tupoksi, kemudian Renstra yang diuraikan dalam bentuk program dan kegiatan, dan terakhir realisasinya. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja Bapedalda Propinsi Jambi maka, peneliti melakukan uji regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Sedangkan untuk mengukur kinerja lembaga menggunakan metode pengukuran dengan Skala Likert. Berdasarkan uji regresi berganda, maka dapat diketahui bahwa kinerja Bapedalda Propinsi Jambi sangat dipengaruhi oleh empat faktor tersebut dengan nilai R Square 0,903 atau 90%. Sementara itu, berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan skala likert, maka secara keseluruhan kinerja lembaga ini masuk dalam kriteria Baik (76,73%). Bila dilihat berdasarkan masing-masing faktor maka faktor Kepemimpinan

(85%) ini masuk dalam kriteria Sangat Baik. Meskipun demikian, ditinjau dari faktor sumberdaya khususnya sarana pada lembaga ini perlu ditingkatkan lagi (69,08%).

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: (1) ada kesesuaian antara Tupoksi dan Renstra yang dibuat Bapedalda Propinsi Jambi. (2) Terdapat empat faktor yang mempengaruhi kinerja Bapedalda yaitu, kepemimpinan, struktur organisasi, sumber daya (sumberdaya manusia, dana) dan koordinasi. (3) Kinerja Bapedalda Propinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masuk dalam kriteria Baik (76,73%).

Saran dari hasil penelitian ini (1) Pengelolaan lingkungan merupakan kerja multi-sector, multi-diciplinary, multi-temporal, dan multi-scale, maka perlu pengembangan keterpaduan pengelolaan lingkungan dalam kaitannya dengan peningkatan hubungan antar lembaga, (2) Diperlukan perubahan kebijakan, khususnya peningkatan kualitas kelembagaan dengan memperbaiki unsur-unsur pendukung.